

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM telah diketahui memiliki peran sebagai tulang punggung dari perekonomian nasional. UMKM sendiri adalah sebuah sektor dalam kegiatan ekonomi kecil yang dalam pengelolaannya dapat dijalankan oleh seseorang, organisasi dan sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu yang bertujuan untuk memperoleh laba menggunakan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel. UMKM yang bergerak pada sektor riil memiliki fokus pada pengembangan industri dalam negeri, hal ini juga yang menjadikan UMKM memiliki dampak signifikan yang besar pada perekonomian nasional (Kurni & Wardayani, 2023).

Secara umum, UMKM bermula dari usaha yang bersifat keluarga. Dalam artian bahwa usaha ini dimulai dan dikembangkan oleh pemilik usaha sendiri bersama dengan keluarganya, kemudian ketika usahanya berkembang lebih besar maka pemilik usaha akan menjadikan penduduk sekitar sebagai pekerjanya (Nayla, 2014). Pada kenyataannya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat sebagai jalan keluar dari masalah sosial yang ada. Keberadaan UMKM juga menciptakan lapangan kerja dan menjadi pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia (Tasum, 2020).

Dalam menjalankan sebuah usaha terdapat hal-hal yang menjadi pendorong dicapainya keberhasilan usaha tersebut, salah satu dari hal tersebut adalah Informasi akuntansi. Pada kenyataan yang ditemukan, saat ini masih didapati banyak pengusaha kecil di Indonesia yang tidak mengaplikasikan akuntansi dalam menjalankan usahanya. Para pengusaha masih kurang memahami pentingnya ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyak pengusaha kecil masih belum mencatat laporan keuangan usahanya dengan baik bahkan beberapa tidak mencatat laporan keuangan usahanya. Pengusaha kecil dan menengah seringkali hanya mencatat pendapatan dan pengeluaran (Tasum, 2020).

Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Kota Medan yang mengawasi UMKM di kota tersebut masih belum mengadopsi dan menggunakan informasi akuntansi seperti SAK ETAP maupun SAK EMKM dalam mengelola bisnis mereka. Akibatnya, ketika ditanya tentang jumlah aset yang mereka miliki, mereka tidak dapat memberikan jawaban yang memadai. Sebagai contoh, Bengkel las Regar, yang telah beroperasi sejak tahun 1993 dan berada dalam kategori usaha Menengah di Kecamatan Medan Denai, hanya menerapkan pelaporan keuangan sederhana berupa catatan uang masuk dan uang keluar dalam wawancara terkait pemahaman mereka terhadap SAK EMKM. Mereka belum sepenuhnya menerapkan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM untuk UMKM. Contoh lainnya adalah Roti Bakar Di Jamin, sebuah usaha yang berlokasi di Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Tembung. Dalam wawancara mengenai pemahaman terhadap SAK EMKM, pemiliknya belum

menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan standar SAK EMKM karena kurangnya pemahaman terhadap standar tersebut (Hutapea & Hasibuan, 2022).

Pemilik bisnis masih membutuhkan peningkatan pemahaman tentang informasi akuntansi. Hambatan seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pelatihan bisnis, pengalaman manajerial yang terbatas, dan kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang akuntansi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan informasi akuntansi yang ada. Dengan demikian, diharapkan kualitas keputusan yang diambil oleh mereka dapat ditingkatkan (Lestari & Rustiana, 2019).

Penerapan pencatatan pembukuan yang sejauh ini dilakukan UMKM masih dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih tidak menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang ada. Seiring perkembangan UMKM, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menetapkan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2018. Penetapan SAK EMKM yang jauh lebih sederhana diharapkan menjadi solusi bagi pelaku UMKM dibandingkan menggunakan SAK ETAP. Sangat diharapkan bahwa keberadaan SAK EMKM akan membantu pelaku UMKM menyelesaikan masalah menyusun laporan keuangan yang lebih mudah dan umum diterima, terutama bagi pelaku UMKM. Ini akan membuat mudah untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan atau

memungkinkan investor untuk memberikan pembiayaan kepada para pengusaha UMKM (Mabruri & Wibowo, 2022).

Mengingat pentingnya peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan ekonomi negara, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengambil inisiatif dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2009. Keputusan ini sejalan dengan kebutuhan untuk memberikan kerangka kerja akuntansi yang sesuai dan dapat diterapkan secara efektif oleh UMKM, yang memiliki ciri khas dan skala operasional yang berbeda dari entitas bisnis lainnya. SAK ETAP dirancang khusus untuk memberikan panduan yang lebih relevan dan dapat diakses oleh UMKM dalam menyusun laporan keuangan mereka. Melalui SAK ETAP, DSAK IAI menunjukkan peran strategisnya dalam menciptakan lingkungan akuntansi yang mendukung perkembangan sektor UMKM, yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara (Aulia Sari et al., 2022).

Sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) adalah bisnis yang tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangan secara publik, seperti yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Bisnis tersebut harus memenuhi definisi dan kriteria UMKM yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia selama minimal 2 tahun secara berturut-turut. SAK EMKM disusun dengan aturan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan

SAK ETAP, fokus pada transaksi umum yang biasa dilakukan oleh EMKM, dengan dasar pengukuran yang bersifat historis biaya. Seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan akan standar akuntansi yang lebih mudah dipahami daripada SAK umum yang berlandaskan FRS dan SAK ETAP, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan dengan menggunakan dua standar tersebut (Wiji Lestari & Priantilianingtiasari, 2023).

Oleh karena itu, DSAK IAI memperoleh pengembangan standar akuntansi yang memenuhi keperluan UMKM melalui pembentukan kelompok kerja yang terlibat dengan asosiasi industri, regulator, dan pihak-pihak lain yang tertarik dalam menciptakan SAK yang mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Pada akhirnya, pada tahun 2016, DSAK IAI secara resmi menyetujui SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) sebagai langkah nyata untuk mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia. Selain itu, pergantian SAK ETAP menjadi SAK EMKM disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar entitas mikro, kecil, dan menengah di Indonesia menghadapi kesulitan mendapatkan akses ke perbankan dan sumber pendanaan lainnya. Hal ini menyebabkan EMKM tidak memiliki laporan keuangan yang memadai dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Akibatnya, mendapatkan lebih banyak dana menjadi sulit dan akhirnya tidak dapat melanjutkan usahanya (Nuvitasari et al., 2019).

Penetapan standar akuntansi memiliki tujuan agar setiap UMKM yang ada dapat memiliki gambaran terkait kinerja manajemen dari usaha yang dijalankan di masa lalu dan melihat prospek di masa depan. Penggunaan standar ini dapat diterapkan pada entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang belum atau

tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan serta entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. UMKM mampu membuat serta menyajikan laporan keuangan dengan informatif pasca kehadiran SAK EMKM sehingga dapat membantu para pengusaha UMKM untuk mendapatkan bantuan pendanaan yang dapat mendorong kemajuan dan perkembangan usahanya (Hairunisya & Subiyantoro, 2016).

Keberadaan standar ini digunakan sebagai dasar rujukan yang lebih mudah bagi khalayak luas dalam menyusun laporan keuangan agar mudah diterima secara umum, Pada nyatanya UMKM yang membutuhkan SAK EMKM masih sangat rendah bahkan SAK EMKM dianggap sebagai hal yang memberatkan oleh pemilik usaha kecil dan menengah. Hal ini terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh para pengusaha kecil dan sebagian besar dari mereka tidak memiliki pemahaman terkait urgensi pembukuan bagi keberlangsungan usahanya. Adanya pandangan bahwa pengelolaan laporan keuangan tidak terlalu bermanfaat sehingga para pengusaha hanya memiliki sistem pengelolaan yang sederhana. Hal ini kedepannya dapat berefek pada tingkat keberhasilan suatu usaha, dalam pengelolaan usaha kecil mejadi tidak terarah dan manajer akan kesulitan mengontrol Informasi akuntasinya. Hal inilah yang menjadi permasalahan pada UMKM saat ini yang mengakibatkan kendala dalam perkembangan UMKM (Soleha, 2020). Walaupun SAK EMKM dinyatakan lebih sederhana dan lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan SAK Umum berbasis FRS dan SAK ETAP, penerapan SAK EMKM dalam proses pelaporan keuangan memerlukan pemahaman yang cukup dari pelaku UMKM. Namun, di

sisi lain, UMKM masih kurang menyadari pelaksanaan praktik keuangan, yang memiliki banyak kendala dan kelemahan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas sumber daya yang tidak memadai. Selain itu, SAK EMKM dianggap lebih mudah, tetapi masih baru bagi pemerintah, bisnis, dan pihak lainnya. Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan SAK EMKM secara keseluruhan, pelaku UMKM harus siap sepenuhnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang pemahaman pelaku UMKM tentang SAK EMKM (Salmiah et al., 2018).

Warkop King Kuphi merupakan salah UMKM dengan skala yang cukup besar yang ada di Deli Serdang. Entitas ini adalah jenis usaha dagang yang menyediakan berbagai jenis olahan makanan dan olahan minuman. Usaha ini telah berdiri dalam kurun waktu yang cukup lama dan masih diminati oleh banyak konsumen. Alasan peneliti memilih Warkop King Kuphi sebagai objek penelitian karena usaha dagang yang telah berdiri sejak tahun 2021 merupakan usaha dagang kuliner yang cukup maju dan memiliki banyak peminat dengan berbagai jenis olahan minuman dan makanannya. Selama kurun waktu sejak beroperasi, Warkop King Kuphi hanya melakukan pencatatan setiap pengeluaran dan pemasukan, beban gaji, beban listrik dan utang. Namun belum menerapkan pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Minimnya sosialisasi dan kurangnya pengetahuan tentang administrasi keuangan yang tepat telah menyebabkan laporan keuangan Warkop King Kuphi dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku, dan laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang

menyebabkan pencatatan yang tidak akurat. Padahal Warkop King Kuphi nyatanya membutuhkan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM untuk mendukung entitas dalam proses transisi dari pelaporan keuangan berdasarkan kas menjadi pelaporan keuangan berdasarkan akrual. Selain itu, mungkin membantu Warkop King Kuphi lebih melek terhadap ilmu keuangan sehingga dapat memperoleh pembiayaan dari industri perbankan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai **Analisis Pemahaman Akuntansi dan Sosialisasi Laporan Keuangan Terhadap Penerapan SAK EMKM pada Franchise Warkop King Kuphi di Deli Serdang.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah adalah penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap sesuai dengan standar klasifikasi yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan dan pencatatan laporan keuangan yang telah diterapkan pada *Franchise Warkop King Kuphi*?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh *Franchise Warkop King Kuphi* dalam mengimplementasikan SAK EMKM, termasuk aspek pemahaman akuntansi dan sosialisasi laporan keuangan?

3. Bagaimana dampak pemahaman akuntansi dan sosialisasi laporan keuangan terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan di *Franchise Warkop King Kuphi*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penyusunan dan pencatatan laporan keuangan yang telah diterapkan pada *Franchise Warkop King Kuphi*.
2. Mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh *Franchise Warkop King Kuphi* dalam mengimplementasikan SAK EMKM, termasuk aspek pemahaman akuntansi dan sosialisasi laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui dampak pemahaman akuntansi dan sosialisasi laporan keuangan terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan di *Franchise Warkop King Kuphi*.

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang bermanfaat, penting bahwa setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Oleh karena itu, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman akademis terkait dengan pemahaman akuntansi, sosialisasi laporan keuangan, dan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) di lingkungan waralaba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bentuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan secara teoritis yang telah diperoleh selama masa kuliah serta menambah wawasan.

b. Bagi Akademisi

Dapat menjadi penambahan literatur yang bermanfaat bagi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) umumnya bagi FEB khususnya mahasiswa yang tertarik serta mengembangkan studi terkait pencatatan akuntansi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami aspek-aspek tertentu yang terkait dengan pemahaman akuntansi, sosialisasi laporan keuangan, dan implementasi SAK EMKM di konteks waralaba dan UMKM.

c. Bagi Eksternal

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemilik dan manajemen *Franchise Warkop King Kuphi*, serta pihak-pihak terkait, dalam meningkatkan praktik akuntansi dan manajemen keuangan, khususnya terkait dengan SAK EMKM.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Grand Teori

2.1.1 Theory of Planned Behaviour

Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana), yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (Teori Tindakan Beralasan). Teori Perilaku Terencana yang dikemukakan oleh Ajzen menjelaskan bahwa sikap terhadap suatu perilaku memiliki peran kunci dalam memprediksi aktivitas, meskipun perlu memperhatikan sikap individu ketika menilai kebiasaan personal dan menilai pengaruh persepsi karakter orang tersebut.

Kaitannya dengan penelitian ini terletak pada upaya skala mikro atau menengah, di mana pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan untuk memudahkan manajemen keuangan dan memberikan harapan positif terhadap penerimaan laporan keuangan yang mencakup seluruh informasi yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Oleh karena itu, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan keputusan individu saat mempertimbangkan apakah bersedia atau tidak untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) (D. Lestari, 2023).

2.1.2 Teori Akuntabilitas

Secara semantik, istilah akuntabilitas sangat terkait dengan akuntansi, atau yang lebih umum dikenal sebagai pembukuan. Konsep akuntabilitas berasal dari

pemerintahan William I, sekitar sepuluh tahun setelah penaklukan Inggris oleh Norman pada tahun 1066. Pada tahun 1085, William mewajibkan setiap pemilik properti di wilayah kekuasaannya untuk menyusun inventaris. Agen-agen kerajaan melakukan perhitungan ini dan mencatatnya dalam "*Domesday Books*". Dokumen ini mencatat semua aset raja, termasuk sumpah setia pemilik tanah kepada raja yang kuat. Berdasarkan konteks sejarah tersebut, sejumlah ahli kemudian mencoba untuk memahami akuntabilitas sebagai sebuah hubungan antara pemegang kedaulatan (*sovereign*) dan pelaksana (*subject*), atau yang sering disebut sebagai hubungan antara prinsipal dan agen, atau forum dan actor.

Kata "akuntabilitas" sudah menjadi istilah yang umum bagi semua, walaupun terkadang ada yang tidak sepenuhnya memahami maknanya. Seringkali, akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki perbedaan makna. Jika tanggung jawab merujuk pada kewajiban untuk bertanggung jawab, sebaliknya, akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban yang harus tercapai (Indriswari & Wianto Putra, 2021).

Akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang. Ini berarti menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua informasi yang relevan kepada mereka yang berhak untuk mengetahui tentang kegiatan bisnis atau kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Purwanti & Yuliati, 2022).

Akuntabilitas publik, menurut Halim dan Kusufi dalam (Putri et al., 2023), mengacu pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan

tentang tindakan dan kinerja seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang berhak untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik dalam organisasi pemerintahan berarti memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tentang kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan laporan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi untuk memenuhi hak-hak publik. Karena ada akuntabilitas, lembaga pemerintah harus memprioritaskan pertanggungjawaban secara horizontal daripada hanya secara vertikal.

Akuntabilitas, atau *accountability* merupakan indikator untuk menilai sejauh mana tindakan birokrasi publik atau layanan yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat. Selain itu, hal ini juga menunjukkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya (Setyowati et al., 2020).

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa esensi dari akuntabilitas adalah bahwa individu yang diberi tugas untuk mengelola memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan mandat tersebut. Dalam konteks ini, akuntabilitas membawa konotasi tanggung jawab dan pengawasan dengan memberikan kewenangan kepada berbagai lembaga pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan menciptakan kondisi di mana lembaga-lembaga tersebut saling mengawasi satu sama lain (Putri et al., 2023).

Ada beberapa karakteristik utama dalam sistem akuntabilitas, terlihat dari perspektif akuntabilitas itu sendiri, seperti (Mardiasmo, 2006):

- a). Menitikberatkan pada pencapaian hasil kerja yang optimal.
- b). Menggunakan parameter sebagai alat penilaian kinerja.
- c). Menghasilkan informasi berkualitas tinggi mengenai kinerja untuk para pengambil keputusan.
- d). Melakukan pengumpulan data secara berkala.
- e). Menyampaikan laporan secara rutin dan transparan mengenai hasil-hasil yang dicapai.

2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Sebuah usaha dinyatakan sebagai usaha mikro apabila usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha tersebut telah beroperasi secara produktif sesuai dengan kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri dan bukan anak perusahaan, bagian dari usaha menengah atau besar baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijalankan secara produktif dengan memenuhi kriteria usaha kecil yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha menengah adalah sebuah usaha yang tidak bersangkutan dengan usaha besar atau kecil baik secara langsung maupun tidak langsung melainkan berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha bukan anak perusahaan yang berjalan secara produktif dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (Ariawan, 2022).

Menurut para ahli, berikut adalah beberapa definisi UMKM: (Ariyanto et al., 2021)

- a) Menurut Rudjito, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah pendorong dari perekonomian Indonesia karena melalui UMKM dapat tercipta lapangan pekerjaan baru sehingga kemudian devisa negara dapat meningkat dari pajak badan usaha,
- b) Menurut Adi M. Kwartono sebuah kegiatan ekonomi dinyatakan UMKM apabila kekayaan bersih yang didapatkan tidak lebih dari 200 juta namun belum termasuk dengan tanah dan bangunannya. Masih termasuk UMKM ketika keuntungan penjualan yang didapatkan per tahunnya paling banyak sebesar 1 miliar dan pemiliknya warga negara Indonesia.
- c) Menurut Ina Primiana, UMKM merupakan sebuah area strategis untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan memberikan wadah bagi implementasi program-program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi ekonomi yang ada.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan secara sederhana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh individu atau berbentuk badan usaha, dengan cakupan kegiatan usaha yang relatif kecil atau mikro. UMKM menjadi representasi dari inisiatif ekonomi yang terdiri dari usaha-usaha skala kecil yang berperan penting dalam perekonomian.

Undang-undang Pasal 6 Tahun 2008 memuat beberapa kriteria untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- a) Kriteria untuk usaha mikro merinci bahwa sebuah perusahaan diklasifikasikan sebagai usaha mikro jika kekayaan bersihnya tidak melebihi 50 juta, tanpa memasukkan nilai aset berupa tanah dan bangunan. Dalam hal hasil penjualan, standar maksimum untuk usaha mikro adalah 300 juta per tahun. Ini berarti bahwa entitas bisnis dengan karakteristik tersebut akan dianggap sebagai usaha mikro selama kekayaan bersihnya tetap di bawah 50 juta dan hasil penjualannya tidak melebihi 300 juta setiap tahunnya. Standar ini menjadi panduan penting untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan usaha mikro dalam ranah ekonomi.
- b) Kriteria untuk usaha perdagangan jangka menengah merinci bahwa sebuah perusahaan dianggap sebagai usaha perdagangan jangka menengah jika total asetnya melebihi nilai minimum yang telah ditentukan, yaitu 500 juta, dan tidak melebihi maksimum sebesar 10 miliar. Pentingnya dicatat bahwa dalam pengukuran total aset ini, properti dan bangunan dikecualikan. Selain itu, kriteria ini juga mencakup persyaratan untuk penjualan tahunan, dengan batasan minimum 2,5 miliar dan maksimum 50 miliar. Poin-poin tersebut memberikan pedoman khusus untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan usaha perdagangan jangka menengah sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.

Kriteria tersebut dapat berubah seiring waktu sesuai dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang diatur melalui keputusan presiden. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan standar usaha perdagangan jangka menengah

dengan dinamika ekonomi dan keputusan pemerintah terkait (Dharma et al., 2023).

Sebenarnya, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih mengalami banyak hambatan. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh UMKM adalah permodalan. Sedangkan masalah lain yang berhubungan dengan *financial* seperti (Cahya et al., 2021):

- a) Biaya transaksi sangat tinggi karena adanya prosedur kredit yang kompleks, memakan banyak waktu, dan memberikan jumlah kredit yang terbatas.
- b) Kesulitan dalam memperoleh akses ke sumber dana disebabkan oleh kurangnya keberadaan bank di daerah terpencil dan ketersediaan informasi yang tidak memadai.
- c) Banyaknya UMKM yang kurang memahami prinsip-prinsip manajemen keuangan, serta kekurangan keterampilan dalam mengelola aspek manajerial dan finansial.

2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah alat yang dapat digunakan oleh entitas untuk berkomunikasi informasi penting kepada pihak-pihak terkait, baik itu internal maupun eksternal. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali investasi, dan juga sebagai indikator bahwa klaim kekayaan yang belum terselesaikan mungkin mengandung risiko yang dapat merusak penggunaannya, merupakan aspek lain dari penggunaan uang (Winarso & Yuniarto, 2023).

Laporan keuangan menyediakan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan yang memainkan peran penting untuk kebutuhan internal maupun eksternal perusahaan itu. Produk pinjaman yang berkualitas tinggi dan mudah dibentuk harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh pihak terkait. Dalam situasi ini, aturan sistem keuangan harus sesuai dengan pengakuan hukum umum di Indonesia (Wulandari & Fitri, 2022).

Laporan keuangan bermanfaat bagi bankir, kreditur, pemilik, dan pihak-pihak terkait dalam mengevaluasi dan menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Dalam PSAK No.1 disebutkan bahwa tujuan dari perencanaan pengelolaan uang adalah untuk dapat dibandingkan dengan rencana pengelolaan uang periode sebelumnya atau rencana pengelolaan uang untuk jenis usaha lain.

Tujuan umum dari laporan keuangan adalah sebagai berikut (Dharma et al., 2023):

- a. Memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang aset dan kewajiban.
- b. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai akibat dari operasinya.
- c. Menyediakan informasi yang andal tentang perubahan kekayaan bersih non-operasional.
- d. Memberikan informasi yang membantu pengguna laporan keuangan mengevaluasi kinerja entitas dalam memperoleh laba.
- e. Menyampaikan informasi tentang hal-hal lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Laporan keuangan yang lengkap mencakup (Nuvasari et al., 2019):

- a. Laporan Laba Rugi. Laporan laba rugi adalah dokumen yang disusun secara teratur yang menggambarkan pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitas dalam suatu periode tertentu, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh entitas dalam periode tersebut. Untuk bisnis jasa, pendapatan dalam laporan laba rugi adalah penjualan, sedangkan untuk bisnis dagang dan manufaktur, pendapatan dalam laporan laba rugi adalah penjualan.
- b. Laporan Perubahan Modal. Laporan perubahan modal adalah dokumen yang menunjukkan bagaimana jumlah modal awal telah berkurang selama waktu tertentu. Keuntungan perusahaan, penarikan modal oleh pemilik, atau penambahan modal dapat menyebabkan fluktuasi modal.
- c. Laporan Arus Kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan uang dan setara kas yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Investasi seperti ini harus dikonversi menjadi arus kas selama periode waktu tertentu dan dikategorikan ke dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.
- d. Neraca (*Balance Sheet*). Neraca adalah laporan keuangan tahunan yang menunjukkan kekayaan bersih dan kondisi keuangan, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas selama suatu periode waktu.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke laporan keuangan untuk membantu pembaca memahami perhitungan yang dibahas dalam laporan keuangan.

2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah serangkaian prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencapai konsistensi dalam penyajian informasi keuangan. SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dirancang khusus untuk entitas yang tidak berkewajiban menyajikan laporan keuangan mereka secara publik secara luas. Biasanya, SAK ETAP diterapkan oleh usaha kecil dan menengah yang tidak terdaftar di pasar modal. Menurut IAI (2018), tujuan SAK ETAP adalah agar entitas dapat menyusun laporan keuangan mereka sendiri, menjalani proses audit, dan mendapatkan opini audit, sehingga mereka dapat memiliki akses yang lebih besar dalam mendapatkan pendanaan (Anisykurlillah & Rezqika, 2019).

Di Indonesia, SAK merupakan penerapan dari berbagai standar akuntansi yang sudah ada, seperti IAS, IFRS, ETAP, dan GAAP. SAK yang berbasis pada IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas dengan tanggung jawab publik yang signifikan dan yang terlibat dalam kegiatan lintas negara. SAK Umum sering dianggap sebagai standar akuntansi yang kompleks dalam penerapannya. Dalam hal ini, SAK ETAP memberikan kemudahan kepada entitas dengan aturan pelaporan yang lebih sederhana (Ariesta & Nurhidayah, 2020).

SAK ETAP bertujuan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki tanggung jawab yang signifikan kepada publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk kepentingan umum, seperti investor dan kreditur. SAK ETAP memiliki

beberapa keunggulan yang bisa diterapkan, antara lain (Ariesta & Nurhidayah, 2020):

- a. Kemampuan untuk menyusun laporan keuangan secara independen.
- b. Kemampuan untuk menyajikan laporan keuangan dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan PSAK IFRS.
- c. Laporan keuangan dapat menjadi dasar bagi proses audit, sehingga memungkinkan entitas untuk menggunakan laporan keuangannya sebagai alat untuk mendapatkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.
- d. Tetap memberikan informasi yang dapat diandalkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk keperluan pengambilan keputusan bagi para pengguna.

2.5 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), serta aturan-aturan regulasi pasar modal yang berlaku bagi entitas yang berada di bawah pengawasannya (D. Lestari, 2023). Sementara itu, Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) merujuk pada suatu entitas, baik yang sudah atau belum berbadan hukum, dengan skala mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang (Sari, 2021).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) tahun 2016, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pada bab 1 paragraf 1 dijelaskan bahwa SAK EMKM dirancang untuk aplikasi pada entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, pada bab 1 paragraf 2 SAK EMKM menjelaskan bahwa entitas mikro, kecil, dan menengah merujuk pada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana yang didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (M. Wi. Lestari, 2021).

Bahri dalam (Mahardani H, 2023) mengungkapkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan suatu panduan akuntansi yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM disusun dengan penyesuaian pada transaksi umum yang biasa dilakukan oleh Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM), hanya berdasarkan biaya historis. Dengan demikian, EMKM hanya mengakui nilai aset dan kewajiban sejauh harga pembelian. Dalam konteks ini, istilah EMKM merujuk pada entitas yang tidak memiliki tingkat keterbukaan informasi publik yang signifikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

Tujuan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, yang dapat memberikan manfaat bagi berbagai pengguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna

dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pemegang saham non-manajemen, karena EMKM dapat memiliki bentuk usaha selain Perseroan Terbatas (PT). Berbagai pihak lain seperti otoritas pajak yang membutuhkan kejelasan dalam menentukan besaran dan fasilitas pajak, serta instansi pemerintah lain yang mengharapkan data untuk keperluan pembinaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, juga merupakan pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut (Rizky, 2021).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2021), antara pihak yang menggunakan laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas termasuk (Susilowati et al., 2021):

a) Investor

Investor, baik penanam modal berisiko maupun penasihat mereka, memiliki kepentingan terhadap risiko yang terkait dengan investasi dan hasil dari pengembangan investasi yang mereka lakukan. Informasi diperlukan oleh investor untuk mengevaluasi apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi mereka, dan mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan penilaian terhadap kemampuan entitas untuk membayar dividen.

b) Karyawan

Karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi tentang stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga mencari informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan entitas dalam memberikan imbalan pasca-kerja.

c) Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman memiliki kepentingan pada informasi keuangan yang memungkinkan mereka menentukan apakah suatu entitas layak untuk diberi pinjaman dan untuk mengukur kemampuannya dalam membayar pinjaman sesuai jatuh tempo.

d) Pemerintah

Pemerintah dan lembaga-lembaga yang berada di bawah kekuasaannya tertarik pada alokasi sumber daya dan oleh karena itu, juga tertarik pada aktivitas suatu entitas. Mereka membutuhkan informasi keuangan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

e) Masyarakat

Perusahaan memiliki dampak pada anggota masyarakat dalam berbagai aspek. Sebagai contoh, perusahaan dapat memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional, termasuk jumlah pekerjaan yang diciptakan dan perlindungan bagi investor domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi tentang tren dan perkembangan terkini mengenai kemakmuran perusahaan serta berbagai kegiatan yang dilakukannya.

Karakteristik kualitatif dari Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) terdiri dari empat aspek, yakni:

a) Relevansi

Informasi dianggap relevan jika dapat digunakan oleh pengguna dalam proses pengambilan keputusan, mempengaruhi aspek ekonomi pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta mengonfirmasi atau mengoreksi evaluasi yang telah dilakukan di masa lalu (Mutuari & Yudiantara, 2021).

b) Representasi

Representasi informasi pada laporan keuangan harus tepat sesuai dengan yang seharusnya disajikan, bebas dari kesalahan materi dan bias. Laporan keuangan dianggap memiliki bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika tujuannya adalah memengaruhi pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan (Oktavia & Masdiantini, 2023).

c) Keterbandingan

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode guna mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan, serta untuk mengevaluasi perubahan dalam posisi dan kinerja keuangan (Setyo N & Triyanto, 2023).

d) Keterpahaman

Informasi yang disajikan harus dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna yang diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai dan kemauan untuk mempelajari informasi tersebut (Nurul Aini, 2022).

Terdapat berbagai jenis laporan keuangan yang dikenal, seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan

Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Namun, dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), hanya terdapat tiga jenis laporan keuangan, yaitu (Rismawandi et al., 2022):

a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini mencerminkan aset (harta), liabilitas (kewajiban/utang), dan ekuitas (modal) suatu entitas pada tanggal akhir periode. Laporan posisi keuangan ini memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan entitas pada titik waktu tertentu.

b) Laporan Laba/Rugi

Laporan ini berisi informasi tentang pendapatan dan beban selama periode tertentu, mencerminkan peristiwa yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran selama satu periode (umumnya satu tahun).

c) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terkait asumsi, prinsip, dan metode yang digunakan dalam penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah valid, dibutuhkan penyajian beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang harus berhubungan pada standar laporan keuangan UMKM yang didasarkan pada SAK EMKM. Beberapa penelitian tersebut adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT).	Kadek Neti Mutiari dan I Gede Agus Pertama Yudantara (2021)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi, Dan Penerapan Akuntansi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM.	Variabel dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Buleleng.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan penerapan akuntansi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM (Y). Hal ini dapat berarti bahwa keseluruhan variabel yang digunakan dapat mempengaruhi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM.
2	Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi.	Rismawandi, Indah Rahayu Lestari, Rinny Meidiyutiani (2022)	Kualitas SDM, Persepsi Pelaku UMKM, Pemahaman UMKM, Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM.	Variabel dalam penelitian ini adalah UMKM subsektor pangan yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang tahun 2018 sebanyak 11.746 unit.	Penelitian ini menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia memengaruhi implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), persepsi pelaku SAK EMKM tidak memengaruhi implementasi SAK

					EMKM, pemahaman UMKM memengaruhi implementasi SAK EMKM, dan sosialisasi SAK EMKM tidak memengaruhi SAK EMKM.
3	Jurnal Sustainable (Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surabaya).	Margi Susilowati, Anna Marina, Zeni Rusmawati (2021)	Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Persepsi Pelaku UMKM, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Penerapan Sak EMKM Pada Laporan Keuangan UMKM di Kota Surabaya.	Variabel dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dengan kriteria pelaku UMKM yang bersektor fashion.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi SAK EMKM, persepsi pelaku UMKM, dan pemahaman akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM dan sosialisasi SAK EMKM, persepsi pelaku UMKM, dan pemahaman akuntansi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.
4	Jurnal Akuntansi Profesi.	Tri Wahyuni Oktavia, Putu Riesty Masdiantini (2023)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi dan Tingkat Pendidikan Pelaku Usaha Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada UMKM	Variabel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM formal di Kabupaten Buleleng tahun 2022.	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa 1) Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM; 2) Sosialisasi

			di Kabupaten Buleleng.		berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM; 3) Tingkat Pendidikan Pelaku Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM dan 4) Pemahaman akuntansi, sosialisasi dan tingkat pemahaman pelaku usaha berpengaruh secara simultan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng
5	SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah.	Sekar Ayu Kristi Setyo N, Eko Triyanto (2023)	Pengaruh Pemahaman Dasar Akuntansi, Pemahaman SAK EMKM, dan Kesiapan UMKM Terhadap implementasi SAK EMKM (Studi Kasus Pada Umkm Btc Solo).	Variabel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di BTC Surakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemahaman dasar akuntansi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada pelaku UMKM di BTC Surakarta; 2) Pemahaman SAK EMKM tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada pelaku UMKM di BTC Surakarta; dan 3) Kesiapan UMKM berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAK

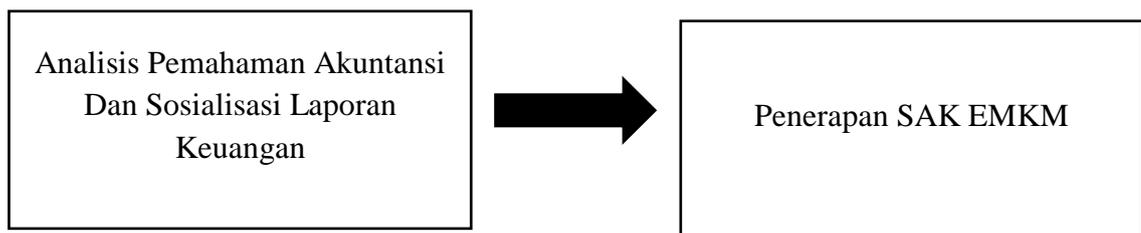
					EMKM pada pelaku UMKM di BTC Surakarta.
6	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT).	Dayu Putu Sri Agustini, I Gusti Ayu Purnamawati (2022)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Skala Usaha Dan Budaya Organisasi Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi Kasus Pada Umkm Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng).	Variable dalam penelitian ini adalah 222 UMKM di Kecamatan Banjar.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM, (2) pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM, (3) skala usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM, dan (4) budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM.
7	Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan	Nindya Pranandisyana, Nugraeni Nugraeni (2023)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kesiapan Pelaku UMKM, dan Persepsi UMKM terhadap Implementasi SAK EMKM pada Laporan Keuangan UMKM.	Variabel dalam penelitian ini adalah UMKM sektor makanan dan minuman di Kabupaten Sleman dengan response berjumlah 33 UMKM.	Penelitian menyatakan hasil bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan sedangkan kesiapan pelaku UMKM dan persepsi UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM.

8	Jurnal Ilmiah ESAI	Galuh Artika Febriyanti, Agung Sri Wardhani (2018)	Pengaruh Persepsi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Wilayah Kota Surabaya.	Variabel dalam penelitian ini adalah 50 UMKM yang berlokasi di Surabaya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, persepsi para pelaku UMKM memiliki pengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM, sementara tingkat pendidikan dan sosialisasi memiliki pengaruh negatif.
9	TECHNOBIZ: International Journal of Business	Dewi Ayu Wulandari, Fitri Agustina (2022)	Analisis Faktor Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM (Studi Pada UMKM Di Kota Bandar Lampung)	Variabel dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Bandar Lampung yang berjumlah 100 sampel.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, ukuran usaha serta pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerapan UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.
10	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan.	Beni Suhendra Winarso, Arif Sapta Yuniarto (2023)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Teknologi Informasi, Ukuran Usaha, Tingkat Pemahaman Akuntansi, dan Sosialisasi terhadap Penerapan SAK EMKM.	Variabel dalam penelitian ini adalah 39 UKM yang berada di DI Yogyakarta.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, teknologi informasi, dan ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Sebaliknya variabel tingkat pemahaman akuntansi dan sosialisasi SAK

					EMKM berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.
--	--	--	--	--	---

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar penelitian untuk menyelidiki permasalahan yang akan diangkat sebelum merinci permasalahan yang akan dibahas. Struktur konseptual ini diilustrasikan sebagai suatu gambaran yang melibatkan beberapa elemen kunci yang terkait dengan konteks penelitian (Inayah & Muanisah, 2018). Kerangka konseptual ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual